

**INTEGRASI TIMOR TIMUR DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAH
INDONESIA (1976-1999)**

M. Rizky Pratama¹, Wawat², Deri Ciciria³

Rizkypratama230796@gmail.com, wawatsuryati@gmail.com, cici201528@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tiga permasalahan pokok yaitu menganalisis tentang faktor penyebab Integrasi, proses Integrasi Timor Timur ke dalam pemerintahan Indonesia dan dampak Integrasi Timor Timur dalam perspektif pemerintahan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri dari tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rakyat Timor Timur berkeinginan untuk bergabung dengan Indonesia agar penajahan dan konflik sosial di Timor Timur berakhir, proses integrasi dimulai ketika Indonesia memiliki kepentingan untuk membendung pengaruh komunis di Asia. Adapun dampak negatif dari integrasi menimbulkan banyak korban jiwa maupun harta bagi rakyat Timor Timur, sedangkan dampak positif banyak membantu perkembangan pola pikir masyarakat Timor Timur dalam memandang dan menyelesaikan permasalahan.

Kata kunci: Integrasi, Timor Timur, Indonesia.

***Abstract:** This study aims to describe and analyze three main issues, namely the reasons for East Timor integration from the perspective of the Indonesian government, the process of East Timor's integration into the Indonesian government, and the impact of East Timor integration. The research method employed is the historical method, which includes the heuristic phase, source criticism, interpretation and historiography. The results of this study suggest that if Indonesia is interested in curbing the influence of communism in Asia, the people of East Timor are willing to join Indonesia, thus ending colonialism and social conflict in East Timor and starting the process of integration. The negative impact of the integration has caused many loss of life and property to the East Timorese people, while the positive impact has greatly cultivated the East Timorese people's problem-seeking and problem-solving mindset.*

***Keywords:** Integration, East Timor, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Timor Timur atau yang sekarang dikenal dengan Negara Democratic Republic Timur-Leste merupakan daerah bekas jajahan Portugis. Selain itu daerah tersebut pernah menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang disebut daerah

tingkat satu Timor-Timur. Timor Timur mempunyai hubungan sejarah yang erat dengan Indonesia. Sebelum kedatangan bangsa Portugis, wilayah Timor Timur berada dalam pengaruh kekuasaan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya yang menjadikannya bagian dari nusantara.

Perjalanan sejarah Timor Timur sangatlah panjang.

Berdasarkan peninggalan-peninggalan yang ditemukan di Timor Timur menunjukkan bahwa penduduk Timor Timur adalah bangsa Indonesia juga, merak dulu bersatu dengan suku-suku lain di Indonesia, hanya penjajah yang memisahkan mereka, sebagian orang Timor Timur berasal dari orang Melayu, Makassar, dan Papua. Pada masa penjajahan Portugis bahasa resmi yang digunakan ialah bahasa Portugis, setelah bergabung dengan Indonesia bahasa nasional yang digunakan di Timor Timur adalah bahasa Indonesia, di samping itu banyak sekali bahasa daerah yang digunakan. Bahasa daerah yang digunakan di daerah yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena daerahnya bergunung-gunung yang memisahkan daerah-daerah itu. Di antara bahasa daerah itu, bahasa tentu adalah bahasa yang paling banyak digunakan di antara bahasa-bahasa lain. Bahasa tentu dipakai di daerah-daerah bagian tengah, selatan, Dili, Suai, Vikeke dan daerah-daerah perbatasan daerah Timor Barat. Sebagian besar rakyat mengerti bahasa ini dianggap bahasa sehari-hari, bahasa tentu ini banyak persamaannya dengan bahasa Indonesia.

Pada tahun 1642, Portugis mulai melakukan proses kolonisasi di Timor Timur dengan meruntuhkan pusat kerajaannya, mulai memperluas pengaruh politiknya serta memonopoli perdagangan di daerah pantai tanpa masuk ke pedalaman. Penerapan sistem

kolonialisme Portugis terhadap Timor ini lebih didorong faktor tantangan yang datang dari Belanda, dimana Belanda hampir menguasai seluruh pulau di Nusantara termasuk di wilayah Timor yang pada akhirnya wilayah Timor ini terbagi atas dua bagian yaitu wilayah Timor bagian barat yang dikuasi Belanda dan wilayah Timor Timur yang dikuasai Portugis. Penderitaan rakyat Timor Timur akibat penjajahan Portugis sampai tahun 1975 masih terus berlangsung, mereka diwajibkan berkerja selama satu bulan dalam setahun terutama diperkebunan-perkebunan kopi tanpa diberi upah.

Selain itu mereka juga diwajibkan membayar pajak yang tinggi. Mereka yang sering melawan diganjar dengan hukuman fisik bahkan sebagian ada yang dibuang ke Mozambig dan Angola. Ketika terjadinya revolusi bunga di Portugis pada tahun 1975, Lemos Pieres, tidak mendapatkan jawaban dari pemerintah pusat di Portugis unuk mengirimkan bala bantuan ke Timor-Timur yang sedang terjadi perang saudara, maka Lemos Pieres memerintahkan menarik tentara Portugis yang sedang bertahan di Timor Timur untuk di evaluasi ke pulau kambing atau yang dikenal dengan pulau Auroto, perubahan peta politik di negara Portugis juga berdampak juga di wilayah koloninya di Timor Timur. Pada perkembangannya, pemerintah Portugis melakukan tindakan tidak tegas dan tidak bertanggung jawab di Timor Timur. Menurut pendapat Imran (1983:27)

bahwa proses kolonisasi Portugis terhadap Timor Timur berlangsung lama, bahkan setelah Indonesia merdeka dari Belanda dan Jepang tahun 1945, Timor-Timur belum juga merdeka. Baru pada tahun 1974 masalah Timor Timur muncul dalam perkembangan politik global. Hal tersebut akibat dari revolusi bunga atau revolusi anyelir yang terjadi di Lisbon Portugis. Dampak dari revolusi bunga tersebut turut memengaruhi sikap Portugis terhadap daerah jajahan. Sikap Portugis tersebut adalah dekolonisasi terhadap daerah jajahannya termasuk Timor Timur.

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwasanya sikap politik Portugis terhadap Timor Timur yaitu dilaksanakannya proses dekolonisasi, dimana Pemerintah Portugis yang baru memberikan kelonggaran kepada rakyat Timor Timur untuk mendirikan partai-partai politik guna menyalurkan aspirasi mereka tentang bagaimana dekolonisasi itu harus dilaksanakan. Kebijakan Portugis tersebut disambut baik dengan dibentuknya partai-partai politik yang mempunyai ideologi dan aspirasinya sendiri. Partai-partai tersebut adalah : Pertama, UDT (*Unio Democratica de Timorese*/Uni Demokrasi Rakyat Timor). Kedua, Fretilin (*Fretilin Revolucioner de Timor Leste Independence*/front revolusioner untuk kemerdekaan rakyat Timor Timur). Ketiga, Apodeti (*Associaco Populer Democratica de Timorese*/Asosiasi Rakyat Timor Demokrat, dengan

terbentuknya partai-partai politik tersebut, untuk menentukan nasib dan kedudukan Timor Timur, maka di kemudian hari diadakan referendum dengan ketiga partai organisasi tersebut sebagai wadah pembawa aspirasi rakyat dan sebagai suatu kenyataan yang hidup untuk menentukan nasib sendiri.

Referendum tersebut meliputi tiga pilihan yaitu: Pertama, menjadi daerah otonomi dalam federasi dengan Portugal. Kedua, menjadi negara bebas dan merdeka. Ketiga, berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan Portugis tersebut disambut baik dengan dibentuknya partai-partai politik yang mempunyai ideologi dan aspirasinya sendiri. Pada tanggal 31 Agustus 1974 ketua umum Apodeti Arnaldo dos Reis Araujo, menyatakan partainya menghendaki bergabung dengan Republik Indonesia sebagai provinsi ke 27. Perimbangan yang diajukan karena rakyat Timor Timur dan Indonesia mempunyai persamaan dan hubungan yang erat, baik secara historis, dan etnis maupun geografis menurutnya integrasi akan menjamin stabilitas politik di wilayah Timor Timur. Antara UDT dan Fretilin mula-mula terjadi persekutuan yang tujuannya menghancurkan Apodeti. Tetapi kemudian terjadi perpecahan antara UDT dan Fretilin. Penyebabnya adalah persoalan tanah. Terjadi ketegangan antara kedua partai itu, Timor Timur terancam perang saudara berbagai jalan damai telah ditempuh namun tidak berhasil. Menghadapi ketegangan ini,

pemerintah Portugis justru membantu Fretilin. UDP dan Apodeti memprotes sikap pemerintah Portugis itu. Tanggal 11 Agustus 1975, UDT mendahului untuk melancarkan aksi perebutan kekuasaan.

Perang saudara akhirnya meletus, pertempuran yang sengit terjadi. Pada akhirnya kota Dili direbut kembali oleh Fretilin karena mendapat dukungan langsung dari Portugis yang menjadikan Fretilin semakin kejam. Korban dari rakyat bekas jajahannya cukup banyak berjatuh, tetapi Portugis membiarkan perang saudara itu terjadi, hal ini mengakibatkan UDT menjadi sadar, nasib Timor Timur tidak dapat di gantungkan pada Pemerintah Portugis. Perang saudara yang terjadi yang berkecambuk di Timor Timur menjadikan negara-negara tetangga bergerak dan bertindak secepatnya. Demi rasa kemanusiaan Pemerintah Indonesia memberi banyak bantuan seperti obat-obatan, bahan makanan, pakaian, tempat tinggal sementara dan lain lain sebagainya, pemerintahan Indonesia, Australia, Amerika serikat kemudian mengadakan pertemuan di wonosobo, untuk membahas kekacauan yang timbul di Timor Timur, Amerika dan Australia mendukung tindakan Indonesia. Bantuan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada rakyat timor timur bukan hanya menolong para pengungsi saja, pemerintah Indonesia mengusahakan pula supaya pihak yang berperang mau berdamai maka pemerintah Indonesia berunding dengan pemerintah Portugis, Indonesia dan Portugis sepakat untuk mencari

jalan damai. Pihak-pihak yang berperangpun diminta untuk berunding, pada tanggal 7 November 1975 partai-partai yang bergabung demi kedamaian dan kemerdekaan Timor Timur seperti : Apodeti, UDT, Kota dan Trabalista mengeluarkan pernyataan ingin berintegrasi atau bersatu dengan Pemerintahan Indonesia, kemudian ke empat partai tersebut membentuk pasukan gabungan. Ketika berintegrasi dengan pemerintah Indonesia pada tahun 1976 sampai dengan 1999 yang kemudian mendeklarasikan negaranya sebagai negara yang merdeka yang berdiri sendiri dengan nama Timor Leste.

Dalam proses mengintegrasikan Timor Timur ke wilayah Indonesia, Indonesia merancang sebuah undang-undang integrasi dan mendirikan dan mendirikan Majelis Rakyat pada bulan Mei 1976. Tugas dari anggota majelis ini adalah menyusun petisi yang diperuntukkan kepada presiden Soeharto yang meminta Indonesia untuk mengabdikan integrasi. Petisi ini di tandatangani oleh Arnaldo dos Reis Araujo sebagai ketua PSTT (Pemerintahan Sementara Timor Timur) dan Guilherme Goncalves selaku dewan perwakilan rakyat daerah, isi utama dari petisi itu adalah agar Timor Timur di satukan dengan Indonesia tanpa harus dilakukannya sebuah referendum. Pada tahun 1975 perkembangan politik di Timor Timur mengalami keadaan yang paling kritis dengan adanya tindakan sepihak oleh fritilin, dengan melakukan

proklamasi kemerdekaan pada tanggal 25 November 1975.

Namun partai lain menandingi deklarasi kemerdekaan fretilin dengan melakukan deklarasi integrasi yang isinya ingin bergabung dengan Indonesia dan akhirnya masuknya Timor Timur ke dalam negara Indonesia disahkan melalui UU No 7 Th 1976 (In 1976-36) tentang pengesahan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia selain itu juga lahir PP No. 19 Th 1976 (LN. 1976-36) tentang pembentukan provinsi ingkat 1 Timor Timur serta dipertegas lagi melalui ketetapan MPR No. VI/MPR/1976 yang mengukuhkan penyatuan wilayah timor Timur yang terjadi pada tanggal 27 Juli 1976 kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia proses Integrasi ini didasarkan pada deklarasi Belibo yang di tanda tangani pada tanggal 30 November 1975. Deklarasi Belibo dan ketentuan-ketentuan di atas menjadi dasar klaim bagi pemerintah Indonesia dengan Fretilin yang mengklaim sebagai pemerintah. Pada tanggal 17 Juli 1976, presiden Soeharto menandatangani undang-undang yang telah disetujui oleh dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia. Meresmikan tindakan Indonesia mengintegrasikan Timor Timur pada tahun 1976.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Integrasi Timor Timur Dalam Perspektif Pemerintahan Indonesia (1976-1999)”

mengkaji peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu, sehigggga metode penelitian yang tepat untuk digunakan adalah metode penelitian sejarah. Menurut Gilbert J Garragan, S.J. metode sejarah sebagai seperangkat asas dan aturan yang sistematis yang didesain guna membantu secara efektif untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya kritis dan menyajikan sintesis hasil-hasil yang dicapainya, yang pada umumnya dalam bentuk tertulis (Daliman, 2012:27).

Penelitian sejarah, terfokus pada peristiwa-peristiwa yang telah berlalu yang dengan melakukan rekonstruksi masa lalu, berdasarkan sumber data atau saksi sejarah yang masih ada hingga saat ini. Untuk memudahkan proses penelitian, maka peneliti mengumpulkan berbagai sumber data penelitian dua teknik pengumpulan data, yakni melalui teknik kepustakaan dengan tujuan memperoleh data dari berbagai sumber buku, artikel, majalah untuk mendapatkan teori-teori penunjang penelitian dan teknik dokumentasi dengan tujuan untuk dapat mengumpulkan dokumen atau arsip hasil penelitian dari lapangan sebagai bahan baku penunjang pembuktian kebenaran akan data yang tercantum.

Penelitian sejarah (historis) terdiri dari empat tahapan penelitian yaitu: 1. Heuristik yaitu pengumpulan sumber sumber data 2. Kritik yaitu menyelidiki keaslian dan kesahihan sumber-sumber data yang didapat 3. Interpretasi yaitu merangkai berbagai sumber-sumber data

yang telah di kritik menjadi satu kesatuan yang mampu menerangkan objek penelitian 4. Historiografi yaitu tahap penulisan hasil penelitian (Nugroho Notosusanto, 1948: 11). Adapun langkah-langkah dalam proses penelitian ini, sebagai berikut:

1. Heuristik

Pada tahap pertama, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan sumber yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas (Sulasman.H, 2014:93). Pada kegiatan pencarian dan mengumpulkan sumber-sumber mengenai pengaruh gerakan teosofi dalam penciptaan nasionalisme dan kemunculan elite modern Indonesia. Penulis mencari beberapa toko buku yang berada di Kota Bandar Lampung Seperti toko buku Gramedia, Pasar bawah, dan Perpustakaan Daerah Lampung. Penulis juga mencari sumber dari toko onlineshopee, Buka lapak, serta *browsing internet* sebagai bahan tambahan pengetahuan mengenai penelitian yang dikaji.

2. Kritik

Pada tahap kedua, peneliti melakukan kritik dengan tujuan untuk mendapatkan otentitas (authenticity). Tahapan kritik terbagi menjadi dua macam, yaitu kritik ekstern dengan melakukan verifikasi atau pengujian terhadap data-data sumber sejarah yang telah didapatkan, dan kritik intern untuk mengelidiki apakah data-data sumber sejarah yang didapatkan berkaitan dengan masalah

penelitian yang diuji kredibilitas sumber.

3. Interpretasi

Pada tahap ketiga, peneliti melakukan interpretasi atau penafsiran sejarah yang sering disebut dengan analisis sejarah dengan menguraikan hasil penelitian dalam bentuk deskriptif.

4. Heuristik

Pada tahap keempat, penulis melakukan penyusunan fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah diseleksi dalam bentuk penulisan sejarah. Penulis melakukan penulisan dengan merangkaikan sejumlah fakta yang relevan, sehingga terwujudlah suatu tulisan sejarah sebagai cerita yang menyangkut tentang Integrasi Timor Timur dalam Perspektif pemerintahan Indonesia (1976-1999).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Integrasi Timor Timur ke dalam Pemerintah Indonesia

1. Faktor dari Rakyat Timor Timur.

Bagi Timor Timur politik dekolonisasi yang dijalankan oleh Portugis setelah tumbangnya Presiden Antonio de Spínola menjadi salah satu kesempatan untuk membentuk partai politik, yang akan menjadi sebuah wadah bagi suara rakyat, pemimpin Apodeti meyakinkan rakyat Timor Timur untuk bergabung dengan Indonesia karena faktor Geografis, kedekatan Etnik dan keberagaman histori, selain

itu Indonesia menjamin masa depan Timor Timur serta menjaga keamanan Timor Timur, inilah yang menjadi alasan logis mengapa rakyat Timor Timur harus memutuskan untuk berintegrasi dan bergabung dengan pemerintahan Indonesia.

2. Faktor dari pemerintahan Indonesia. Pada masa pemerintahan Soeharto Timor Timur bukan bagian dari wilayah teritorial politik Republik Indonesia. Indonesia mengejar penggabungan tersebut sebagai strategi mempengaruhi politik di wilayah Timor Timur.

Proses Integrasi Timor Timur dalam Pemerintahan Indonesia

Integrasi wilayah Timor Timur dalam pemerintahan Indonesia, mengalami proses yang cukup panjang. Hal ini ditandai dengan munculnya beragam peristiwa, antara lain:

- 1) Kekacauan politik

Kekacauan politik dalam pemerintahan Portugal dan perpindahan kekuasaan sipil ke tangan militer sampai dengan munculnya referendum (31 Maret 1975) tentang penentuan masa depan negerinya sendiri membuat rakyat Timor Timur membentuk partai politik, antara lain UDT, Fretilin dan ASDT untuk mengampanyekan pilihan politiknya serta mempersiapkan rakyat untuk mengikuti pemilihan umum guna menentukan nasib Timor-Timur.

- 2) Campur tangan Pemerintah Indonesia
Pemerintah Indonesia ikut campur tangan untuk menggabungkan bekas jajahan Portugis (Timor Timur) dengan badan Intelejennya yaitu BAKIN melalui suatu operasi komando yang telah berhasil membentuk partai politik APODETI.

- 3) Perang saudara

Perang saudara yang terjadi akibat masalah politik karena massa tidak setuju dengan pemerintah. Perang ini terjadi karena Badan Intelijen BAKIN melalui operasi komando dan kedua media propagandanya, memperluas berita-berita yang isinya hanya menggembar-gemborkan FRETILIN sebagai partai komunis yang telah menerima senjata dari Cina dan akan melakukan kudeta. Informasi seperti inilah yang menambah keyakinan UDT terhadap ancaman FRETILIN yang semakin radikal dan terjadilah perang saudara di Timor Timur.

- 4) Deklarasi sepihak

Deklarasi sepihak dan kudeta Fretilin atas wilayah Timor Timur (Dili) yang masih memihak pada pemerintahan Portugal.

- 5) Deklarasi Malabo

Sehari setelah deklarasi Timor Timur secara sepihak oleh Fretilin, partai lain mengeluarkan proklamasi integrasi untuk mengimbangi langkah yang di ambil Fretilin. Mereka yang pro integrasi proklamasi menuduh

deklarasi sepihak Fretilin menghambat solusi damai atas konflik dan hak rakyat Timor Timur atas penentuan nasib sendiri. Pemerintah dan rakyat Indonesia diminta untuk mengambil segala langkah melindungi hak hidup rakyat yang kini menganggap dirinya sebagai rakyat Indonesia namun hidup di bawah terror dan praktik pasis menjadi pemicu bagi presiden Soeharto untuk mengesahkan invasi besar-besaran Indonesia atas Timor Timur.

- 6) Invasi Militer Indonesia ke Timor Timur, yang bertujuan untuk melenyapkan pemerintahan Fretellin, pada tanggal 7 Desember 1975 10.000 anggota pasukan Indonesia yang didukung oleh kapal perang buatan Rusia, pesawat angkut, tank amfibi, pesawat terbang dan helikopter buatan Amerika melakukan penyerbuan atas Dili.

- 7) Peresmian Integrasi Timor Timur Oleh Indonesia

Setelah pertemuan Fretilin di Soibada, Indonesia merancang undang-undang Integrasi dan menjadikan Dili sebagai pemerintahan sementara, mengumpulkan orang-orang dalam suatu badan yang disebut majelis rakyat pada bulan Mei 1976 yang bertugas menyusun petisi kepada presiden Soeharto untuk mengabulkan integrasi dan mengajukan petisi singkat yang berisi agar Timor Timur disatukan

dengan Indonesia tanpa dilakukannya sebuah referendum pada masa pemerintahan presiden Soeharto.

- 8) Operasi keamanan setelah peresmian Integrasi

Setelah resminya Integrasi Timor Timur dengan pemerintahan Indonesia terus melakukan operasi keamanan Timor Timur. Pada akhir tahun 1976, pesawat serang udara Bronco OV-10 pertama buatan AS tiba di Indonesia dan dipergunakan untuk melumpuhkan serangan dan menghancurkan pasukan pemberontak Fretilin.

- 9) Pemilu pertama di Timor Timur

Setelah selesainya operasi keamanan militer Indonesia berkesimpulan bahwa mereka telah berhasil mengamankan wilayah ini ketika pemilihan umum dilaksanakan pada tahun 1982, ini juga diselenggarakan untuk pertama kalinya di Timor Timur.

Dampak Integrasi Timor Timur dalam Perspektif Pemerintah Indonesia

Integrasi Timor Timur dalam perspektif pemerintah Indonesia terbagi dalam dua dampak yakni dampak negatif dan dampak positif. Negatif dari Integrasi Timor Timur ke Indonesia. Adapun dampak negatif dari integrasi Timor Timur ke Indonesia mempengaruhi berbagai bidang. Mulai dari bidang sosial dengan munculnya operasi Seroja pada tahun 1976-1979, munculnya pemberontakan Setelah Takluknya Timor Timur oleh ABRI tahun 1980 dan tragedi

Santa Cruz tahun 1991. Pengaruh pada bidang politik, resistensi yang dipimpin oleh Fretilin nyaris dihancurkan oleh operasi pengepungan dan pembasmian 1978-1978. Sedangkan dalam bidang ekonomi, akhir tahun 1977 sampai 1979 terjadi operasi besar yang menyebabkan kelaparan di Timor Timur, penduduk sipil menyerahkan diri pada militer Indonesia. Tidak ada kegiatan perekonomian di Timor Timur karena berada di bawah pengawasan militer Indonesia.

Dampak Positif dari Integrasi Timor Timur dalam Pemerintah Indonesia. Masyarakat Timor Timur pada saat berada di Pemerintahan Indonesia banyak mengalami perkembangan yang signifikan terutama dalam bidang sosial ekonomi dan politik. Wilayah Timor Timur mendapatkan tingkat pemerataan pendidikan, irigasi, kesehatan serta sarana dan prasarana. Guna mengawali pembangunan ekonomi, pemerintah Indonesia melaksanakan “ program darurat” yang sering disebut dengan “crash program“ sasaran utamanya adalah pembangunan prasarana produksi pertanian di wilayah Timor Timur. Dalam bidang politik di wilayah Timor Timur dapat diselesaikan secara positif, yang semula menyelesaikan masalahnya dengan kudeta/pertempuran, sekarang berubah menjadi politik diplomasi dan tanpa kekerasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ketika

pemerintahan Protugis mengalami krisis dalam bidang politik, social, dan ekonomi, menyebabkan pergeseran pemerintahan sipil ke tangan militer. Ketika pemerintahan dijalankan oleh militer, pemerintahan menghasilkan satu kebijakan yang memberikan peluang bagi wilayah jajahan protugis untuk membentuk partai politik dan berkesempatan untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Menyikapi hal tersebut terbentuklah beberapa partai politik diwilayah jajahan protugis di Timor Timur, diantaranya : partai Fretilin, Apodeti, Kota, Tralabista dan Aldita.

Dalam perjalanannya memperjuangkan kemerdekaan untuk wilayahnya partai politik di Timor Timur mengalami perpecahan dan mengalami perbedaan dalam tujuan. Ada partai yang pro kemerdekaan dan ada pro integrasi, perbedaan ini disebabkan adanya penyusup dari kelompok komunis internasional, yang menyusup kedalam salah satu partai politik di Timor Timur untuk memanfaatkan situasi demi memperluas penyebaran ideologinya. Peristiwa inilah yang menjadi alasan pemerintah Indonesia untuk menyatukan wilayah Timor Timur ke dalam wilayah NKRI.

Perbedaan tujuan antara partai politik di Timor Timur menyebabkan pecahnya perang saudara, antara kelompok pro kemerdekaan dan kelompok yang pro integrasi, puncak dari perselisihan yang tidak memiliki

titik temu diantara kedua belah pihak yang bertangkai, memicu salah satu pihak yang pro kemerdekaan mendeklarasikan kemerdekaan Timor Timur secara sepihak, peristiwa ini memancing pihak yang pro integrasi juga mendeklarasikan integrasi wilayah Timor Timur ke dalam wilayah pemerintahan Republik Indonesia di Balibo. Selain faktor keinginan masyarakat Timor Timur sendiri yang ingin melakukan Integrasi terhadap Indonesia, invasi militer yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia juga menjadi faktor penting terlaksananya integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia, setelah peristiwa diatas terjadi Indonesia menindak lanjuti petisi yang disampaikan masyarakat Timor Timur yang pro Integrasi dengan melakukan pencarian fakta untuk membuktikan kebenaran jikalau masyarakat Timor Timur ingin dan tanpa paksaan untuk berintegrasi dengan Pemerintahan Indonesia.

Setelah keinginan sebagian masyarakat Timor Timur dan Indonesia tercapai untuk berintegrasi dan menghalang penyebaran komunis internasional tercapai, keadaan Timor Timur tidak juga kunjung membaik, justru cenderung memburuk, konflik sosial semakin meruncing sehingga menimbulkan konflik social yang menyebabkan posisi Indonesia terpojok dimana masyarakat dunia bahkan masyarakat Indonesia sendiri mengutukperbuatan Indonesia terhadap masyarakat Timor Timur. Pada tanggal

30 Agustus 1999 merupakan hari bersejarah bagi Timor Timur, hari dimana mereka dapat memilih dan menentukan masa depan mereka sendiri, kemudian pada tanggal 4 September 1999 merupakan pembacaan hasil pemungutan suara yang hasilnya 78,5% memilih pemisahan diri dari Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Daliman. 2012. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta.
- Notosusanto, Nugroho. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: yayasan penerbit UI.
- Sulasman. 2014. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Bandung: Pustaka Setia.